BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat dan Jepang memiliki hubungan bilateral paling menonjol di Asia selama lebih dari 50 tahun hingga abad ke-21 (Peter, Sugita, & Sant, 2007, pp. 1-5). Akan tetapi, hubungan kedua negara tersebut tidak selamanya mulus. Hal tersebut ditandai pada saat Perang Dunia II, ketika AS sangat giat untuk menjadi negara hegemon. Sedangkan Jepang sangat aktif dalam mengusir invasi Barat dan melakukan ekspansi ke kawasan Asia-Pasifik. Keaktifan Jepang menarik perhatian pihak AS dan Sekutu karena dianggap sebagai ancaman oleh kedua pihak (Ashari, 2015, p. 475).

Oleh karena itu, AS membuat strategi agar dapat menundukkan Jepang. Strategi AS pada tahun 1907-194 untuk meredam keaktifan Jepang dalam rencana yang dinamakan *War Plan Orange*. *War Plan Orange* berisi rencana AS dalam mengganggu misi untuk mengusir invasi Barat ke Asia (Train, 1993, pp. 105-108). Program tersebut berhasil memancing amarah Jepang. Selain itu, pada tahun 1940, AS memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Jepang seperti melarang ekspor bijih besi, besi tua, dan baja dengan harapan bahwa perampasan tersebut dapat menghentikan kemajuan imperialistik Jepang. Kemudian, pada Juli 1941, AS mengakhiri semua perdagangan dengan Jepang dan membekukan semua aset Jepang di AS, Inggris, Tiongkok, dan Belanda dalam memberlakukan embargo ekspor minyak ke Jepang (Hackler, 2001, p. 55).

Pada saat itu, Jepang kehilangan beberapa sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan ekonominya sehingga dihadapkan dengan beberapa opsi. Opsi pertama adalah menghentikan pengusiran barat di Asia. Opsi kedua adalah mempertahankan *status quo* yang pada akhirnya berkonsekuensi terhadap terhentinya ekonomi Jepang. Kedua opsi ini akan menyebabkan Jepang kehilangan *power*-nya. Sehingga Jepang tidak memilih kedua opsi tersebut tetapi memutuskan opsi lain. Opsi tersebut adalah Jepang berencana untuk menguasai sebagian Asia Tenggara, yaitu Semenanjung Malaya, Indonesia, dan Filipina. Opsi tersebut juga dipilih untuk menggantikan sumber daya yang diembargo dan membangun lingkungan pengaruh ekonominya sendiri (Hackler, 2001, p. 55).

Oleh karena itu, untuk menjalankan opsi tersebut para pemimpin Jepang setidaknya harus meminimalkan keberadaan Angkatan Laut AS yang kuat di Pasifik yang berpotensi mengganggu jalur pelayarannya. Dengan demikian, Jepang meluncurkan serangan terhadap Angkatan Laut AS yang ditempatkan di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jepang akhirnya memutuskan untuk menunjukkan *power*-nya dalam peristiwa pemboman pangkalan militer AS di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 (Hackler, 2001, p. 55; Rozman, 2015).

Menanggapi serangan di Pearl Harbor, AS balik menyerang Jepang. AS menyerang Tokyo, Nagoya, Osaka, dan kota-kota besar lainnya melalui serangan udara, dan menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 2 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945. Sebelum penyerahannya terhadap Sekutu, para pemimpin AS, Inggris dan Uni Soviet bertemu dalam Deklarasi Postdam. Isi deklarasi tersebut membahas salah satunya terkait dengan Jepang yaitu penghapusan militerisme,

pendudukan Jepang, wilayah, perlucutan senjata militer, hukuman penjara, pemulihan demokrasi, pembentukan hak asasi manusia, dan penghapusan industri militer. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar rekonstruksi Jepang (The Historian of the U.S. Department of State, 2022).

Dalam Deklarasi Postdam tersebut pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Setelah penyerahan tersebut, pada September 1945 AS yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur memegang otoritas sebagai pemimpin dan merekonstruksi Jepang pada masa pendudukannya di Jepang (Ando & Nisuke, 1986). Posisi MacArthur dikenal sebagai *Supreme Commander for the Allied Powers* (SCAP). SCAP memiliki kekuasaan penuh atas Jepang. Bahkan pemimpin Jepang pada saat itu, Kaisar Hirohito, tidak memiliki kewenangan penuh atas negaranya. Meskipun demikian, kewenangan SCAP hanya terbatas pada pulau-pulau utama Jepang, yaitu Honshu, Hokkaido, Shikoku, dan Kyushu (Gilbert, 2015).

Selain itu, dalam rangka mengatur sistem pendidikan, media massa, media hiburan dan opini publik, SCAP membentuk *Civil Information and Education Section* (CIE) dan *Civil Censorship Detachment* (CCD). CIE dan CCD ini dibentuk melalui *War Guilt Information Program* (WGIP) yang berjalan pada tahun 1945-1948. Program tersebut bertujuan untuk menerapkan batasan-batasan kepada masyarakat Jepang mengenai, sejarah yang diajarkan di sekolah, surat kabar, dan radio (Gilbert, 2015). Hal tersebut membuat masyarakat Jepang merasa tidak "demokratis" seperti yang diharapkan dan direncanakan oleh pada deklarasi postdam (Casey, 2008, pp. 41-50; The Historian of the U.S. Department of State, 2022).

Selain itu, SCAP menuntut masyarakat untuk tunduk pada regulasi dan sensor yang ketat. Masyarakat Jepang merasa terpaksa untuk menerima pembatasan mulai dari penerbitan surat kabar, radio, bahkan surat pribadi warga biasa yang harus di cek oleh pasukan SCAP. Bahkan dalam sekolah-sekolah ditayangkan film oleh AS sebagai bagian dari program WGIP untuk memulai sistem baru dalam pendidikan. Tujuan sistem baru dalam pendidikan ini mengakibatkan perubahan dalam ideologi dan cara berpikir individu orang Jepang, menghilangkan militerisme, menghilangkan anti-asing dalam masyarakat Jepang, menyebarluaskan prinsip-prinsip demokrasi, dan informasi tentang AS. (Tsuchiya, 2012, p. 194).

Tidak hanya itu, pada tahun 1946, dalam kewenangannya, SCAP berhasil memaksa Jepang mengubah konstitusi negaranya. Salah satu perubahan yang paling mencolok dalam konstitusi Jepang adalah Pasal 9 yang menyatakan bahwa Jepang menjadikan dirinya sebagai negara pasifis dan menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan pasal tersebut, AS melarang Jepang memiliki senjata-senjata perang untuk kegiatan pertahanan maupun penyerangannya (Juwana, Masalah Penafsiran Terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang, 1992, p. 251).

Setelah berhasil mengubah konstitusi Jepang, dengan berbagai program yang dijalankan, terlihat bahwa AS menanamkan propaganda dalam pemerintahan Jepang. AS berhasil mengubah pola pikir dan ingatan masyarakat Jepang, mematahkan semangat rakyat Jepang, dan merombak Jepang sebagai negara subordinat AS. Keseluruhan program ini mengakibatkan timbulnya rasa bersalah bagi masyarakat Jepang yang masih ada sampai dewasa ini (Casey, 2008, pp. 41-

50; Gilbert, 2015). Meskipun demikian, Jepang harus menerima dengan lapang dada dengan adanya pendudukan AS di Jepang.

Setelah masa pendudukan AS di Jepang, dibentuk Perjanjian Perdamaian San Francisco pada 8 September 1951 yaitu perjanjian damai antara Jepang dan Sekutu, dan menjadi penanda akhir dari Perang Dunia II. Selain itu, isi perjanjian tersebut mengakhiri peran Jepang sebagai kekuatan kekaisaran, dan mengembalikan kedaulatan penuh kepada Jepang. Perjanjian Perdamaian San Fransisco bersama dengan *The Security Treaty between the United States and Japan* yang ditandatangani pada hari yang sama, menandai awal dari hubungan Jepang dengan AS dan perannya dalam politik internasional (United Nations, 1952).

Dari Perjanjian Perdamaian San Fransisco, pada tahun 1957 *United States Forces Japan* (USFJ) merespon dengan bertanggung jawab untuk pertahanan Jepang. Sebagai bagian dari perjanjian ini, pemerintah Jepang meminta agar pangkalan militer AS tetap berada di Jepang. USFJ membangun pangkalan pertamanya yang berlokasi di Yokota, di Tokyo. USFJ setuju untuk menyediakan dana dan berbagai kepentingannya dalam landasan perdamaian, kemakmuran, dan kebebasan di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, dengan adanya USFJ sangat membantu aliansi Jepang dan AS pada bidang keamanan (U.S Forces Japan, 2008). Setelah adanya Perjanjian Perdamaian San Fransisco, Jepang terlihat mulai menerima AS sebagai aliansi.

Pada tahun 1960, Jepang dan AS memperbaharui aliansi dengan menandatangani *Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan*. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat ikatan

perdamaian dan persahabatan di antara mereka serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum. Selain itu, perjanjian tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong kerja sama ekonomi yang lebih erat di antara Jepang dan AS dan mempromosikan kondisi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016).

Dengan demikian, kedua negara tersebut terus melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kerja sama, baik kerja sama militer, ekonomi, dan politik. Namun dalam adanya kerja sama yang dibangun oleh Jepang dan AS, menimbulkan pro da kontra. Dalam peningkatan kerja sama militernya, keberadaan USFJ masih menjadi konflik di Jepang (Sebata, 2012, p. 206), dilema untuk merelokasi pangkalan militer di Okinawa (Pitriyadi, 2019, pp. 320-321). Serta adanya pemerkosaan terhadap 12 orang Jepang yang diduga dilakukan oleh pasukan AS, (BBC, 2013).

Selain itu, adapula masalah yang ditemukan pada peningkatan kerja sama bidang ekonomi, seperti konflik perdagangan Jepang-AS yang muncul pada tahun 1980-an sebagai tanggapan atas defisit perdagangan/pembayaran AS yang sangat besar serta tuduhan revisionis terhadap Jepang yang muncul kembali pada akhir 1990-an sebagai konsekuensi krisis ekonomi Asia Timur (termasuk Jepang) (Gilpin, 2003, p. 300), dan adanya pengaruh krisis minyak dunia pada tahun 1973-1974 (Putri, 2014), krisis ekonomi AS pada tahun 2004 yang berdampak kepada Jepang sebagai negara *subordinat*.

Oleh karena itu, penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini bahwa adanya implementasi WGIP yang dijalankan SCAP telah ikut campur

dalam merekonstruksi negara Jepang, baik dari konstitusi maupun sistem pendidikan, dan informasi. Sehingga sampai saat ini Jepang masih bergantung dengan AS yang *nota bene* merupakan negara *superpower* Penulis juga memahami adanya urgensi penelitian ini, yaitu WGIP yang dijalankan oleh SCAP berdampak terhadap pola hubungan bilateral Jepang dan AS dalam bidang keamanan, ekonomi dan politik. Penulis berharap penelitian yang akan dilakukan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Dengan demikian, penelitian ini menjadi signifikan untuk diangkat dengan melihat sejauh mana WGIP sangat berpengaruh terhadap hubungan bilateral Jepang dan AS sampai periode yang dibatasi pada tahun 2022.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, penulis menentukan dan mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana implikasi *War Guilt Information Program* terhadap dinamika hubungan bilateral Jepang-Amerika Serikat?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi *War Guilt Information Program* terhadap dinamika hubungan bilateral Jepang-Amerika Serikat.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis menjabarkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan di bawah ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mengenai pengaplikasian ilmu Hubungan Internasional dalam hubungan bilateral antarnegara.
2. Memberikan pemahaman bahwa WGIP secara tidak langsung berimplikasi terhadap hubungan bilateral antara Jepang dan AS.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran kepada pembaca bahwa fakta-fakta sejarah dapat berimplikasi terhadap hubungan bilateral antarnegara
2. Sebagai referensi kepada pembaca bahwa terdapat fakta-fakta sejarah yang perlu diketahui untuk mengaitkan antara peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan isu-isu hubungan internasional kontemporer.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat, dan tujuan yang ingin diraih oleh penulis dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel jurnal, dan beberapa sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian, jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen-instrumen, tempat, dan waktu.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi mengenai uraian dari topik skripsi menjelaskan *War Guilt Information Program* 1945-1952 sekaligus menjelaskan hubungan bilateral Jepang-AS. (diuraikan isinya)

Bab V Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA